

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-903/K/SU/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka perlu ditetapkan Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan dan Pembangunan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-713/K/SU/2002;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan PPID serta unsur-unsur pendukung pelaksanaan tugas PPID dilingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan PPID serta unsur-unsur pendukung pelaksanaan tugas PPID di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, melaksanakan tugas dan tanggungjawab seperti yang tertera dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep.653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2010

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

TTD.

MARDIASMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-903/K/SU/2010
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2010

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

A. Tim Pertimbangan Layanan Informasi

1	Kepala BPKP
2	Sekretaris Utama
3	Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian
4	Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam
5	Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
6	Deputi Bidang Akuntan Negara
7	Deputi Bidang Investigasi

B. PPID Pusat dan Unsur Pendukung Pelaksanaan Tugas PPID

1.	PPID BPKP	Kepala Biro Hukum dan Humas
2.	Bidang Pengelola Informasi	Kepala Pusinfowas
3.	Bidang Layanan Informasi	Kepala Bagian Humas dan HAL
4.	Bidang Pengaduan & Penyelesaian Sengketa	Kepala Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum
5.	Bidang Dokumentasi & Arsip	- Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum - Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pusinfowas

C. PPID Unit Kerja Pusat dan Perwakilan

1.	PPID pada Deputi Bidang Perekonomian	Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri
2.	PPID pada Deputi Bidang Polsoskam	Direktur PI_P Bidang Polsoskam Lainnya
3.	PPID pada Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II
4.	PPID pada Deputi Bidang Akuntan Negara	Direktur Pengawasan BUMD
5.	PPID pada Deputi Bidang Investigasi	Direktur Investigasi Instansi Pemerintah
6.	PPID pada Biro Perencanaan Pengawasan	Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
7.	PPID pada Biro Kepegawaian dan Organisasi	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
8.	PPID pada Biro Keuangan	Kepala Biro Keuangan
9.	PPID pada Biro Hukum dan Humas.	Kepala Biro Hukum dan Humas
10.	PPID pada Biro Umum.	Kepala Biro Umum

11.	PPID pada Pusinfowas	Kepala Pusinfowas
12.	PPID pada Puslitbangwas	Kepala Puslitbangwas
13.	PPID pada Pusdiklatwas	Kepala Pusdiklatwas
14.	PPID pada Pusbin JFA	Kepala Pusbin JFA
15.	PPID pada Inspektorat	Inspektur
16.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi NAD	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NAD
17.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
18.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
19.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi
20.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau
21.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
22.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
23.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
24.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I
25.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta II	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta II
26.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
27.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
28.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
29.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta
30.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali
31.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur
32.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
33.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
34.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
35.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

36.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
37.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
38.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
39.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
40.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2010

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

TTD.

MARDIASMO